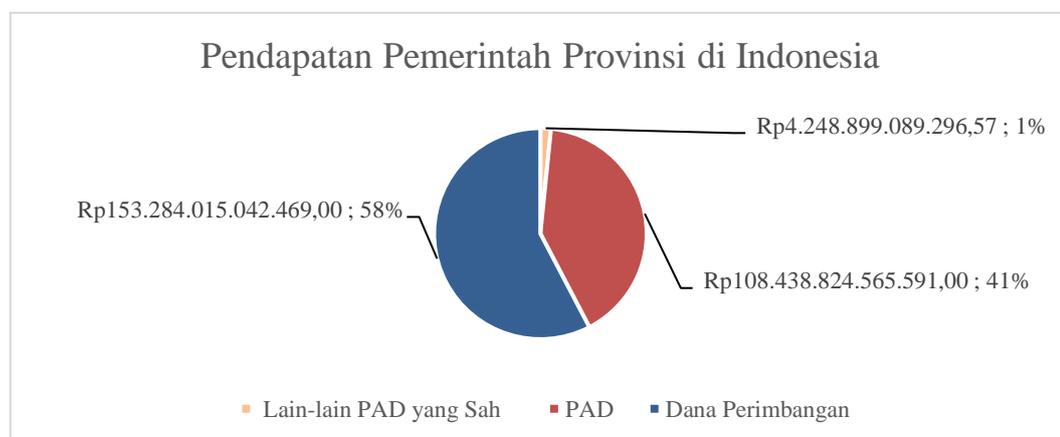


BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Setiap pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota di Indonesia diberikan kewenangan untuk menggali sumber daya potensialnya. Setiap daerah harus mampu meminimalisir ketergantungan dana dari pemerintah pusat dan menjadikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber pendapatan utama. Namun, kenyataannya pendapatan daerah provinsi di Indonesia masih didominasi oleh dana transfer dari pusat atau dana perimbangan dibandingkan dengan PAD. Dana perimbangan terdiri dari Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Bagi Hasil atau DBH (Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004). Penerimaan daerah yang berasal dari DAU menunjukkan jumlah yang terus meningkat dari tahun ke tahun dan dari PAD berfluktuasi dari tahun ke tahun, bahkan cenderung menurun (Ilmiyyah, Saftiana dan Wahyudi, 2020). Pemerintah daerah cenderung memiliki ketergantungan terhadap pemerintah pusat dan menganggarkan peningkatan belanja guna meningkatkan kemampuan daerah dalam upaya meningkatkan PAD. Hal tersebut dapat dilihat melalui diagram mengenai komposisi pendapatan yang di dapat oleh pemerintah provinsi di Indonesia tahun 2020 pada gambar 1.1



Sumber: Data diolah dari LHP 2020

Gambar 1.1
Komposisi Pendapatan Pemerintah Provinsi di Indonesia Tahun Anggaran 2020

Pada gambar diagram 1.1, ditunjukkan bahwa pendapatan yang diterima oleh pemerintah provinsi di Indonesia didominasi oleh dana perimbangan sebesar 58%. Penerimaan daerah melalui PAD hanya sebesar 41% dan lain- lain PAD yang sah sebesar 1%. Hal tersebut dapat menunjukkan bahwa pemerintah mengambil keuntungan dengan cara tersebut tanpa berusaha untuk meningkatkan potensi daerahnya sendiri melalui PAD, upaya pemerintah daerah dengan cara tersebut mengindikasikan terjadinya ilusi fiskal (Aprianti, 2020).

Setiap penerimaan pemerintah idealnya harus berdampak pada besaran pengeluaran dan sebaliknya semakin besar pengeluaran maka pemerintah seharusnya memperoleh manfaat meningkatnya penerimaan di masa datang (Nurhayati, 2017). Hal ini menandakan bahwa terdapat hubungan yang sejajar (simetris) antara pendapatan dan pengeluaran pemerintah. Apabila yang terjadi adalah hubungan yang tidak sejajar (asimetris), maka dapat dikatakan terjadi ilusi fiskal. Hal ini dikarenakan pemerintah pusat “tidak menyadari” bahwa kontribusi yang diberikan lebih besar dari yang sebenarnya dibutuhkan oleh pemerintah daerah (Adi dan Ekaristi, 2009).

Ilusi fiskal dipandang “positif” jika kuantitas/manfaat barang dan jasa yang disediakan pemerintah terlalu besar dan dipandang sesuatu yang “negatif” jika harga pajak diremehkan oleh pemilih-pembayar pajak (Prado dan da Silva, 2020). Deteksi ilusi fiskal dapat dilakukan dengan beberapa pendekatan. Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan yaitu Peningkatan pendapatan (*revenue enhancement*), pendekatan manipulasi belanja (*expenditure manipulation*), dan pendekatan pemanfaatan utang (*debt utilization*). Pendekatan peningkatan pendapatan dilakukan dengan menganalisis pertumbuhan realisasi belanja daerah dibandingkan dengan realisasi PAD, pendekatan manipulasi belanja dilakukan dengan melihat peran komponen penerimaan terhadap peningkatan anggarannya dan untuk pendekatan pemanfaatan utang dilihat dari pemanfaatan utang yang dominan dibandingkan kontribusi PAD dalam belanja daerah (Adi dan Ekaristi, 2009; Nurhayati, 2017; Hapsoro dan Yoduke, 2019).

Penelitian ini membutuhkan pembuktian empiris untuk mengetahui terjadinya ilusi fiskal pada pemerintah provinsi di Indonesia. Oleh karena itu,

penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul ”**Analisis Deteksi Ilusi Fiskal pada Pengelolaan Keuangan Pemerintah Provinsi Di Indonesia**”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

- 1) Apakah terjadi ilusi fiskal pada pemerintah provinsi di Indonesia dengan pendekatan peningkatan pendapatan?
- 2) Apakah terjadi ilusi fiskal pada pemerintah provinsi di Indonesia dengan pendekatan manipulasi belanja?
- 3) Apakah terjadi ilusi fiskal pada pemerintah provinsi di Indonesia dengan pendekatan pemanfaatan utang?

1.3 Batasan Masalah

Penelitian ini memiliki batasan masalah berdasarkan rumusan masalah. Batasan masalah terfokus pada deteksi ilusi fiskal dengan pendekatan Peningkatan pendapatan (*revenue enhancement*), pendekatan manipulasi belanja (*expenditure manipulation*), dan pendekatan pemanfaatan utang (*debt utilization*). Permasalahan ilusi fiskal yang akan diteliti meliputi seluruh provinsi di Indonesia, yaitu sebanyak 34 provinsi selama tahun 2011 sampai tahun 2020.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui adanya ilusi fiskal dengan pendekatan Peningkatan pendapatan pada pemerintah provinsi di Indonesia.
- 2) Untuk mengetahui adanya ilusi fiskal dengan pendekatan manipulasi belanja pada pemerintah provinsi di Indonesia.
- 3) Untuk mengetahui adanya ilusi fiskal dengan pendekatan pemanfaatan utang pada pemerintah provinsi di Indonesia.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, bagi:

- 1) Peneliti: untuk menemukan bukti empiris mengenai ilusi fiskal pada pemerintah provinsi di Indonesia.
- 2) Lembaga/almamater: sebagai bahan pengayaan kajian ilusi fiskal (akuntansi keuangan pemerintah) untuk program studi akuntansi sektor publik.